

BAB II

POLITIK & KEBIJAKAN PERSEPAKBOLAAN DI INDONESIA

Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah lembaga negara yang mengatur tentang kepemudaan dan keolahragaan. Lembaga ini dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Imam Nahrawi di era Kabinet Kerja Jokowi yang pada pemerintahan sebelumnya dijabat oleh Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo atau disingkat KRMT Roy Suryo Notodiprojo atau lebih dikenal sebagai Roy Suryo yang menjabat pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu era Presiden Susilo Bambang Yodoyono.

A. Sejarah Kementerian Pemuda dan Olahraga

Pondasi sejarah kelembagaan yang mengurus pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sebenarnya sudah ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Sejarah pengelolaan kegiatan olahraga dan pemuda oleh negara diketahui pada susunan Kabinet pertama yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945. Kabinet yang bersifat Presidensial memiliki Kementerian Pengajaran yang dipimpin oleh Menteri Ki Hajar Dewantoro. Kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani berada di bawah Menteri Pengajaran. Istilah pendidikan jasmani dipergunakan dalam lingkungan sekolah sedangkan istilah olahraga digunakan untuk kegiatan olahraga di masyarakat yang berupa cabang-cabang olahraga. Usia kabinet pertama yang kurang dari tiga bulan kemudian diganti dengan Kabinet II yang berbentuk

parlementer di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang dilantik pada tanggal 14 November 1945, yang menamakannya sebagai Kementerian Kepemudaan.¹

B. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kementerian Pemuda dan Olahraga atau yang biasa disebut dengan Kemenpora merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki peranan sebagai pelaksana yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. Sehingga Kementerian Pemuda dan Olahraga diamanatkan untuk membantu tugas-tugas presiden khususnya dalam perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang pemuda dan olahraga. Oleh karenanya Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyelenggarakan tugasnya memiliki fungsi²:

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pemuda dan olahraga.
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga.
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab nya.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga.

¹ http://kemenpora.go.id/index/kementerian_profil (diakses tanggal 7 September 2016) pukul 11.27 WIB.

² LKIP Kemenpora Tahun 2015, hlm. 4

5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, sasaran, dan pertimbangan di bidang tugas fungsinya kepada Presiden.

C. Struktur Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga

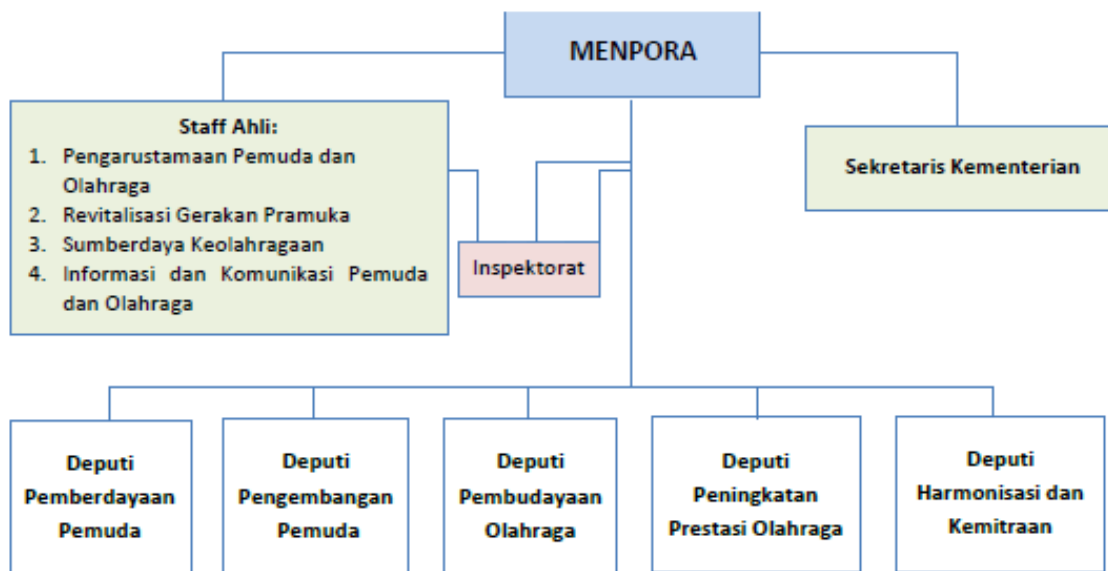
Sebagai Lembaga Negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam membantu presiden, maka lembaga tersebut harus memiliki struktur organisasi yang akuntabel berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berikut ini adalah Struktur Keorganisasian Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015 yang terkait dengan persepakbolaan di Indonesia³:

1. Menteri, yang terdiri atas seorang Menteri;
2. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, yang terdiri atas:
 - a. Asdep Olahraga Layanan Khusus
 - b. Asdep Olahraga Pendidikan
 - c. Asdep Olahraga Rekreasi
 - d. Asdep Industri Olahraga
 - e. Asdep Sentra Keolahragaan
3. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, yang terdiri atas:
 - a. Asdep Tenaga Keolahragaan

³ LAKIP, *Kementerian Pemuda dan Olahraga*, hlm. 4

- b. Asdep Pembibitan Olahragawan
- c. Asdep Olahraga Prestasi
- d. Asdep Penerapan Iptek Keolahragaan
- e. Asdep Organisasi Keolahragaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenpora, digambarkan dalam gambar berikut:



Bagan 2.1 Struktur Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga⁴

D. Sejarah Terbentuknya PSSI

⁴ Kementerian Pemuda dan Olahraga, *LAKIP 2015*, hlm.6

Sejarah berdirinya PSSI tak lepas dari seorang insinyur sipil yang bernama Soeratin Sosrosoegondo. Setelah mengenyam pendidikan di sekolah Tinggi di Heckelenburg, Jerman tahun 1927 dan selang setahun kemudian beliau kembali ke tanah air untuk menjajal karir di sebuah perusahaan Belanda *Sizten en Lausada* yang berpusat di Yogyakarta. Akan tetapi, melihat kondisi tanah air yang saat itu begitu mengenaskan beliau dengan rasa hormat dengan semangat nasionalis memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut dan dari sinilah awal mula benih perkembangan dan pertumbuhan PSSI.

Kemudian setelah itu Soeratin banyak aktif di bidang pergerakan, dan sebagai seorang pemuda yang gemar bermain sepakbola. Ia menyadari sepenuhnya untuk mengimplementasikan apa yang sudah diputuskan dalam pertemuan para pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 (Sumpah Pemuda) Soeratin melihat sepakbola sebagai wahana terbaik untuk menyemai nasionalisme di kalangan pemuda, sebagai tindakan menentang Belanda. Soeratin melihat sepakbola sebagai wahana terbaik untuk menyemai nasionalisme di kalangan pemuda sebagai tindakan menentang Belanda. Kegagalan *Indonesische Voetbal Bond* (IVB) untuk mempersatukan sepakbola menjadi permasalahan yang mesti segera dievaluasi. Jika segera tak teratasi, maka agenda menyamakan gendang tarian antara sepakbola dengan perlawanan di dunia akan terhambat.

Untuk melaksanakan cita-citanya itu, Soeratin mengadakan pertemuan demi pertemuan dengan tokoh-tokoh sepakbola di Solo, Yogyakarta dan Bandung.

Pertemuan dilakukan dengan kontak pribadi menghindari sergapan Polisi Belanda (PID). Kemudian ketika diadakannya pertemuan di hotel kecil Binnenhof di Jalan Kramat 17, Jakarta dengan Soeri - ketua VIJ (*Voetbalbond Indonesische Jakarta*) bersama dengan pengurus lainnya, dimatangkanlah gagasan perlunya dibentuk sebuah organisasi persepakbolaan kebangsaan, yang selanjutnya dilakukan juga pematangan gagasan tersebut di kota Bandung, Yogya dan Solo yang dilakukan dengan tokoh pergerakan nasional seperti Daslam Hadiwasito, Amir Notopratomo, A Hamid, Soekarno (bukan Bung Karno), dan lain - lain. Sementara dengan kota lainnya dilakukan kontak pribadi atau kurir seperti dengan Soediro di Magelang (Ketua Asosiasi Muda).⁵

Kemudian pada tanggal 19 April 1930, berkumpul wakil - wakil dari VIJ (Sjamsoedin - mahasiswa RHS); wakil Bandoengsche Indonesische Voetbal Bond (BIVB) Gatot; Persatuan Sepakbola Mataram (PSM) Yogyakarta, Daslam Hadiwasito, A.Hamid, M. Amir Notopratomo; Vortenlandsche Voetbal Bond (VVB) Solo Soekarno; Madioensche Voetbal Bond (MVB), Kartodarmoedjo; Indonesische Voetbal Bond Magelang (IVBM) E.A Mangindaan (saat itu masih menjadi siswa HKS/Sekolah Guru, juga Kapten Kes.IVBM) Soerabajashe Indonesische Voetbal Bond (SIVB) diwakili Pamoedji. Dari pertemuan tersebut maka, lahirlah PSSI (Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia) nama PSSI ini diubah dalam kongres PSSI di Solo 1950 menjadi Persatuan Sepakbola Seluruh

⁵ <http://www.pssi.or.id/dev/page/detail/5/Sejarah-PSSI>, diakses pada tanggal 07 November 2016, pukul 14:21 WIB.

Indonesia yang juga menetapkan Ir. Soeratin sebagai Ketua Umum PSSI.

Begitu PSSI terbentuk, Soeratin dkk segera menyusun program yang pada dasarnya "menentang" berbagai kebijakan yang diambil pemerintah Belanda melalui NIVB. PSSI melahirkan "stridij program" yakni program perjuangan seperti yang dilakukan oleh partai dan organisasi massa yang telah ada. Kepada setiap bonden/perserikatan diwajibkan melakukan kompetisi internal untuk strata I dan II, selanjutnya ditingkatkan ke kejuaraan antar perserikatan yang disebut "*Steden Tournooi*" dimulai pada tahun 1931 di Surakarta.

Kegiatan sepakbola kebangsaan yang digerakkan PSSI, kemudian menggugah Susuhunan Paku Buwono X, setelah kenyataan semakin banyaknya rakyat pesepakbola di jalan-jalan atau tempat-tempat dan di alun-alun, di mana Kompetisi I perserikatan diadakan. Paku Buwono X kemudian mendirikan stadion Sriwedari lengkap dengan lampu, sebagai apresiasi terhadap kebangkitan "Sepakbola Kebangsaan" yang digerakkan PSSI. Stadion itu diresmikan Oktober 1933. Dengan adanya stadion Sriwedari ini kegiatan persepakbolaan semakin gencar.

Lebih jauh Soeratin mendorong pula pembentukan badan olahraga nasional, agar kekuatan olahraga pribumi semakin kokoh melawan dominasi Belanda. Tahun 1938 berdirilah ISI (Ikatan Sport Indonesia), yang kemudian menyelenggarakan Pekan Olahraga (15-22 Oktober 1938) di Solo.

Karena kekuatan dan kesatuan PSSI yang kian lama kian bertambah

akhirnya NIVB pada tahun 1936 berubah menjadi NIVU (Nederlandsh Indische Voetbal Unie) dan mulailah dirintis kerjasama dengan PSSI. Sebagai tahap awal NIVU mendatangkan tim dari Austria "Winner Sport Club" pada tahun 1936.

Pada tahun 1938 atas nama Dutch East Indies, NIVU mengirimkan timnya ke Piala Dunia 1938, namun para pemainnya bukanlah berasal dari PSSI melainkan dari NIVU walaupun terdapat 9 orang pemain pribumi / Tionghoa. Hal tersebut sebagai aksi protes Soeratin, karena beliau menginginkan adanya pertandingan antara tim NIVU dan PSSI terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian kerjasama antara mereka, yakni perjanjian kerjasama yang disebut "Gentlemen's Agreement" yang ditandatangani oleh Soeratin (PSSI) dan Masterbroek (NIVU) pada 5 Januari 1937 di Yogyakarta. Selain itu, Soeratin juga tidak menghendaki bendera yang dipakai adalah bendera NIVU (Belanda). Dalam kongres PSSI 1938 di Solo, Soeratin membatalkan secara sepihak Perjanjian dengan NIVU tersebut.

Soeratin mengakhiri tugasnya di PSSI sejak tahun 1942, setelah sempat menjadi ketua kehormatan antara tahun 1940 - 1941, dan terpilih kembali di tahun 1942. Masuknya balatentara Jepang ke Indonesia menyebabkan PSSI pasif dalam berkompetisi, karena Jepang memasukkan PSSI sebagai bagian dari Tai Iku Kai, yakni badan keolahragaan buatan Jepang, kemudian masuk pula menjadi bagian dari Gelora (1944) dan baru lepas otonom kembali dalam kongres PORI III di Yogyakarta (1949).

E. Kronologi Intervensi Kemenpora Terhadap Konflik Internal PSSI

Intervensi pemerintah dalam hal ini adalah Kemenpora bukanlah tanpa sebab, semuanya berawal ketika konflik internal di tubuh PSSI dari masa ke masa yang tidak juga segera terselesaikan. Tentunya hal ini akan menyebabkan banyak permasalahan yang nantinya akan berdampak buruk bagi seluruh masyarakat khususnya para pecinta dan pemain sepak bola di tanah air.

Keberadaan olahraga dan politik adalah dua hal yang saling memiliki keterkaitan kepentingan politik, sehingga arah tujuan persepakbolaan Indonesia tidak lagi menjunjung tinggi netralitas dan sportifitas. Artinya, sepakbola merupakan bagian dari alat penentu arah tujuan politik bangsa dan legitimasi politik kekuasaan baik itu untuk kepentingan nasional ataupun hanya sebatas untuk kepentingan pencitraan. Karena hal itulah mengapa didalam tubuh PSSI bisa terjadi perpecahan yang pastinya disebabkan oleh perbedaan tujuan dan kepentingan.

Kepentingan politik semacam itu akan berakibat fatal terhadap masa depan sepak bola nasional, karena hal tersebut akan menimbulkan kecemasan masyarakat akan sanksi dari FIFA (*Federation Internasional Football Association*). Akhirnya, kecemasan masyarakat terbukti benar dan permasalahan tersebut dimulai dimasa menteri Imam Nahrawi di Era Kabinet Kerja Jokowi hingga pada akhirnya berujung pada keluarnya sanksi FIFA terhadap PSSI.

Sanksi FIFA terhadap PSSI tersebut berawal dari munculnya konflik-

konflik internal yang dimulai dari dualisme penyelenggaraan kompetisi yang biasa disebut *Indonesian Super League (ISL)* dan *Liga Premier Indonesia (LPI)* sampai pada intervensi pemerintah dalam hal ini oleh Kemenpora yang di isukan membekukan dan mengambil alih sistem dari pihak PSSI sebagai lembaga sah yang mengatur jalannya kompetisi pertandingan dan semua hal yang bersangkutan.⁶

Untuk membahas lebih jelas mengenai masalah ini, ada dua aspek yang harus dibahas secara mendalam yakni mulai dari kronologi konflik internal PSSI sampai dengan sikap kemenpora yang membekukan PSSI.

1. Masa Pimpinan Nurdin Halid (2003-2011)

Perselisihan didalam tubuh PSSI berawal dari masa pimpinan Nurdin Halid. Masa pimpinan beliau merupakan tonggak permasalahan awal yang sangat reaksioner yang berawal dari masalah konflik interpersonal yakni kasus korupsi yang saat itu sedang di alami oleh Nurdin Halid menyebabkan konflik mulai berkembang di dalam tubuh organisasi itu sendiri, bahkan sampai melibatkan konflik organisasi lain.

Berawal dari penjatuhan vonis 2 tahun pada tanggal 13 Agustus 2007 yang didasarkan pada kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan minyak goreng. Kasus interpersonal yang di alami oleh Nurdin Halid berdampak hingga

⁶ <https://www.selasar.com/budaya/kronologis-konflik-kemenpora-dan-pssi>, diakses pada tanggal 07 November 1993, pukul. 15:55 WIB.

menyebabkan kericuhan dalam kepengurusan organisasi. Berlandaskan atas standar statuta FIFA, seorang pelaku kriminal tidak diizinkan untuk menjabat sebagai ketua umum dalam asosiasi sepak bola nasional. Namun pada saat itu Nurdin Halid bersikeras untuk tetap menjadi pimpinan asosiasi sepak bola nasional yaitu PSSI, bahkan ketika itu sikap bersikeras Nurdin Halid mendapatkan reaksi dari beberapa kalangan diantaranya adalah Jusuf Kalla yang menjabat sebagai wakil presiden saat itu, KONI dan bahkan induk Organisasi sepakbola internasional FIFA juga ikut menanggapi permasalahan ini dan mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada PSSI jika tidak diselenggarakan pemilihan ulang ketua umum.⁷

2. Masa Pembentukan Komite Normalisasi

Kemunculan LPI (Liga Premier Indonesia), menyebabkan konflik dalam tubuh PSSI semakin menjadi-jadi, pasalnya segala aktivitas yang dilakukan oleh LPI pada saat itu dilarang oleh Ketua Umum Nurdin Halid. Kekisruhan ini serasa di tutup-tutupi oleh pengurus PSSI, karena pada saat itu pada tanggal 26 Maret 2011 di Pekanbaru, Riau mereka mengadakan kongres tertutup, yang kemungkinan besar saat itu konflik interna PSSI sengaja disembunyikan. Namun, hasil kongres pada akhirnya tidak menemui titik temu yang disebabkan oleh

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Sepak_Bola_Seluruh_Indonesia#Kasus_korupsi_Nurdin_Halid, diakses 9 November 2016

kekisruhan mengenai hak suara.⁸

Menanggapi permasalahan tersebut, akhirnya FIFA melalui Komite Darurat turun tangan, tepat pada tanggal 1 April 2011 FIFA membentuk Komite Normalisasi untuk mengambil alih kepemimpinan atas PSSI yang saat itu di pimpin oleh Nurdin Halid. Komite Normalisasi dibentuk untuk mengatasi kekisruhan di Indonesia, beberapa tugas Komite Normalisasi Pimpinan Agung Gumelar antara lain lain adalah⁹:

- a. Menggelar kongres berdasarkan *electoral code* FIFA dan Statuta PSSI sebelum 21 Mei 2011.
- b. Komite Normalisasi merangkap sebagai komite pemilihan dan memastikan duet Nurdin Halid, Nirwan Bakrie dan Arifin Panigoro, Geore Toisuta tidak dapat diajukan sebagai calon ketua umum PSSI periode 2011-2015 karena telah ditolakkomite banding dan ditolak oleh FIFA.
- c. Mengambil alih LPI di bawah kendali PSSI atau menghentikan kompetisi tersebut secepat mungkin.
- d. Mengendalikan kegiatan PSSI dengan spirit rekonsiliasi untuk perbaikan sepakbola Indonesia.

Komite Darurat FIFA saat itu menganggap bahwa kepengurusan Nurdin

⁸ *Ibid.*

⁹ Lihat, <http://bola.viva.co.id/news/read/213028-fifa-komite-normalisasi-ambil-alih-tugas-pssi> (diakses tanggal 5 Agustus 2013) Pukul 08.22 WIB.

Halid tidak dapat memajukan sepak bola Indonesia terbukti dengan terbentuknya Kongres dan ketidakmampuan dalam mengendalikan LPI. Selain daripada itu, Komite Darurat FIFA juga memberikan keputusan bahwa 4 orang calon Ketua Umum PSSI yaitu Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, Arifin Panigoro, dan George Toisutta tidak dapat mencalonkan diri sebagai ketua umum, hal tersebut didasarkan pada keputusan Komite Banding PSSI tanggal 28 Februari 2011. Akhirnya Keputusan tersebut berujung pada pengangkatan Agung Gumelar sebagai Ketua Komite Normalisasi PSSI.¹⁰

Setelah kisruh tersebut berlarut-larut cukup lama, akhirnya semenjak terbentuknya Komite Normalisasi PSSI dan tepat disaat dilaksanakan Kongres Luar Biasa tanggal 9 Juli 2011 terpilihlah Djohar Arifin Husin sebagai ketua Umum PSSI periode 2011-2015¹¹

3. Konflik Alfred Riedl dan Indonesia Premier League

Konflik ini terjadi pada masa kepemimpinan Djohar Arifin Husin (2011-2015). Terdapat 2 konflik yang cukup disorot oleh publik diantaranya adalah kasus pemecatan Alfred Riedl dan Konflik Liga Premiere Indonesia.

a. Kisruh yang berujung Pemecatan Alfred Riedl

¹⁰ Lihat, [# Kasus_korupsi_Nurdin_Halid](https://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Sepak_Bola_Seluruh_Indonesia). (diakses tanggal 09 November 2016), pukul 11:24 WIB.

¹¹ *Ibid.*

Alfred Riedl merupakan mantan pelatih tim Garuda, yang saat itu ia berhasil mengantarkan Timnas dan kawan-kawan ke final Piala AFF tahun 2010. Hanya selang beberapa hari akhirnya Alfred Redl dipecat, dengan alasan Pelatih asal Austria itu dianggap tidak terikat kontrak dengan PSSI, tetapi dengan mantan Ketua Badan Tim Nasional Nirwan Bakrie.¹²

Akan tetapi terdapat selisih pendapat antara pihak Alfred dan PSSI. Menurut Nirwan Bakrie yang juga mantan ketua Badan Tim Nasional memang menandatangani kontrak dengan Alfred Riedl. Namun, kontrak itu atas nama institusi PSSI, bukan atas nama pribadi. Atas pemecatan dirinya tersebut Alfred Riedl mengadakan PSSI ke FIFA dan sampai saat ini masih belum terselesaikan.¹³

b. Konflik Liga Premiere Indonesia.

Semenjak Kepengurusan PSSI dibawah Djohar Arifin Husin, baru selang selama 100 hari kerja sudah terdapat permasalahan-permasalahan yang banyak pertentangan dari berbagai kubu. Khususnya pada saat PSSI mencoba untuk merombak total format liga kompetisi musim 2011-12.

Awal mulanya, PSSI hanya ingin melakukan sedikit revisi terhadap tim-tim profesional agar sesuai dengan persyaratan AFC, sehingga seluruh tim dapat

¹² <http://bola.kompas.com/read/2011/07/13/16545324/Kontrak.Cacat..Riedl.Dipecat>, (diakses tanggal 09 November 2016), Pukul 13:08 WIB.

¹³ Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Sepak_Bola_Seluruh_Indonesia#Kasus_korupsi_Nuridin_Halid. (diakses tanggal 09 November 2016) Pukul 13:16.

mengikuti Liga Champion Asia yang sesuai dengan persyaratan dan layak dikatakan sebagai tim profesional apabila meliputi aspek: legal, keuangan, infrastruktur, SDM, dan *supporting*.

Rombak demi rombakan dilakukan PSSI pada saat itu di pimpin oleh Djohar Arifin, dimulai dari niat awalnya yang ingin merubah kompetisi menjadi dua bagian, yakni Liga I dan Liga II. Liga I akan dibagi dalam dua wilayah dengan proyeksi jumlah kontestan sebanyak 36 klub, kemudian berubah lagi bahwa tim-tim yang berlaga di liga level tertinggi akan tetap diikuti oleh 18 tim saja. Karena keputusan tersebut begitu banyak memperoleh pertentangan maka johan meralat keputusannya dan menambah jumlah peserta Indonesia Premier League (IPL) begitu pengurus PSSI menamainya menjadi 24 tim. Rinciannya: 14 tim peserta ISL, 4 tim promosi, dan 6 tim tambahan yang ditentukan begitu saja oleh pengurus PSSI.

Akan tetapi keputusan tersebut merupakan keputusan yang sangat kontroversial dan menyebabkan berbagai tim mengajukan protes khususnya terhadap 6 tim yang ditentukan begitu saja. Karena perombakan yang dilakukan PSSI ini begitu banyak memperoleh tekanan maka pada saat itu LPI sendiri dihentikan begitu saja di tengah jalan, sebelum musim kompetisi tuntas berakhir.¹⁴

¹⁴ <http://www.viva.co.id/bola/read/256112-rapor-merah-100-hari-pssi-era-djohar-arifin> (diakses 09 November 2016), pukul 14:00

4. Konflik PSSI terhadap Kemenpora

Konflik PSSI yang berawal dari masa pemerintahan kabinet Indonesia hebat hingga kabinet kerja sekarang ini belum juga usai. Bahkan saat ini muncul konflik baru yaitu konflik PSSI terhadap Kemenpora. Titik awal munculnya sengketa ini bermula pada keikutsertaan Arema Indonesia dan Persebaya Surabaya dalam pertandingan QNB League, karena kedua tim tersebut telah dilarang oleh Badan Plahraga Profesional Indonesia (BOPI). Atas dasar hal tersebut tepat pada tanggal 8 April 2015 Kemenpora memberikan surat peringatan terhadap PSSI yang menyatakan bahwa PSSI telah mengabaikan surat rekomendasi dari BOPI ataspelarangan terhadap kedua tim tersebut.

Karena pada saat itu PSSI mendapatkan “intervensi” dari Kemenpora, maka tepat pada tanggal 10 April 2015 FIFA menyurati Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk tidak melakukan intervensi terhadap PSSI, apabila intervensi tersebut masih terus berlanjut maka FIFA akan meberikan sanksi kepada PSSI.¹⁵ Namun karena menurutnya bahwa Surat peringatan dari FIFA tersebut banyak kejanggalan¹⁶ maka Kemenpora tidak begitu menanggapi. Surat menyurat antara Kemenpora dengan PSSI berujung pada tanggal 17 April 2015 dengan dikeluarkannya surat keputusan terkait dengan pembekuan PSSI, selain daripada itu Menpora tidak mengakui penyelenggaraan Kongres Luar Biasa PSSI

¹⁵ [http://id.wikipedia.org/wiki/](http://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Sepak_Bola_Seluruh_Indonesia) Persatuan_Sepak_Bola_Seluruh_Indonesia Kasus_korupsi_Nurdin_Halid. (diakses tanggal 09 November 2016) Pukul 13:16. #

¹⁶ <http://m.matranews.com/news.php?id=1754> (diakses 09 November 2016) pukul 14:44

yang tengah berlangsung di Surabaya. Sebagai gantinya pemerintah akan membentuk Tim Transisi yang mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai dengan terbentuknya kepengurusan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA. Sedangkan soal Timnas Indonesia untuk SEA Games dan penyelenggaraan QNB League akan diambil alih oleh KONI dan KOI.¹⁷

Semenjak sanksi yang dijatuhkan oleh Kemenpora tersebut, nasib para pemain sepak bola tanah air menjadi terkatung-katung. Menanggapi hal tersebut tepat pada tanggal 25 Mei 2015, Jusuf Kalla selaku wakil presiden meminta kepada menpora untuk mencabut pembekuan PSSI pimpinan La Nyalla Mattaliti. Menindak lanjuti anjuran dari wakil presiden, menpora Imam Nahrawi melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Umum PSSI Hince Panjaitan, Ketua Komite Olimpiade Indonesia Rita Subowo dan mantan Ketua Umum PSSI Agung Gumelar di Istana Wapres.

Meskipun Surat Keputusan Menpora tersebut dicabut, pada kenyataannya PSSI akhirnya mendapatkan Sanksi dari FIFA. Tepatnya pada tanggal 30 Mei 2015 secara resmi menjatuhkan Sanksi terhadap PSSI hingga PSSI mampu memenuhi kewajiban pada pasal 13 dan 17 statuta FIFA. Akibat sanksi ini, Timnas Indonesia dan semua klub di Indonesia dilarang berpartisipasi di pentas Internasional di

¹⁷ Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Sepak_Bola_Seluruh_Indonesia #Konflik_PSSI_dengan_Pemerintah. 2C_Pembekuan_PSSI_dan_Sanksi_FIFA, (diakses 09 November 2016) pukul. 14:52 WIB.

bawah FIFA atau AFC, kecuali SEA Games di Singapura hingga turnamen berakhir.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*